

Tingkatkan Kesejahteraan Warganya, Pemdes Puu Nunu Segera Bagikan 10 Kapal Tangkap Ikan

Kabaena, SultraNET. | Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintah Desa Puu Nunu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, fokus memaksimalkan penggunaan dana desa (DD) untuk pembenahan Infrastruktur fisik dan pemberdayaan di desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Jika sebelumnya sukses membangun Gedung Serba Guna Desa dan Membangun Talud Beton, kali ini Pemerintah Desa Puu Nunu bakal membagikan perahu penangkap ikan jenis fiberglass untuk warganya yang berprofesi sebagai penangkap Nelayan.

Kepala Desa Pu'u Nunu, Sahluddin saat dikonfirmasi awak media ini di lokasi pembuatan perahu jenis fiberglass, Minggu (3/8/19), mengatakan, potensi ikan dan pariwisata di daerah itu sangat besar sehingga diharapkan jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan warga desanya.

Untuk itu pihaknya berinisiatif melalui dana desa mencanangkan pengadaan perahu yang telah dilengkapi dengan mesin tersebut agar warganya yang berprofesi sebagai nelayan dapat terbantu dan dimudahkan dalam mencari ikan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Masih banyak nelayan kami yang kesulitan melaut, ini karena keterbatasan fasilitas, jadi kami berinisiatif memanfaatkan dana desa untuk berikan bantuan berupa perahu fiber ini,” Tutar Sahluddin.

Adapun jumlah bantuan yang bakal dikucurkan yaitu sebanyak 10 unit perahu fiber yang sudah dilengkapi dengan mesin dengan anggaran perunitnya yaitu sebesar 14 juta hingga 15 juta rupiah yang pengerjaannya dengan memberdayakan

warga desa yang berprofesi sebagai pembuat kapal jenis fiber.

“Daripada saya pesan perahunya di tempat lain, takutnya tidak sesuai apa yang di harapkan, jadi saya berdayakan warga saya yang memang berprofesi sebagai pembuat perahu jenis fiberglass,”tuturnya.

Pembuatan Kapal tersebut diperkirakan bakal rampung dan dapat dibagikan pada bulan Agustus tahun 2019 ini. Untuk diketahui, tahun sebelumnya Pemerintah Desa Puu Nunu telah membagikan kapal serupa kepada 5 orang janda yang berprofesi sebagai nelayan di desa tersebut. **(FENDI)**

Buku Karl Marx & Lenin Beredar, Polisi Bakal Minta Keterangan Ahli

SultraNET. | Polisi bakal menyelidiki dugaan peredaran buku yang memuat paham komunisme Karl Marx dan Lenin di Gramedia Trans Mal Makassar. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani mengatakan pihaknya akan meminta keterangan saksi ahli terkait buku-buku yang disweeping sekelompok orang dari Brigade Muslim Indonesia.

“Tentu Polda akan meminta pendapat dari para saksi ahli apakah buku yang dijual pihak Gramedia itu menyebarkan ajaran komunisme atau tidak,” kata Dicky saat dikonfirmasi sebagaimana dilansir Merdeka, Minggu (4/8).

Selain itu, **polisi** mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan buku-buku paham komunisme di pasaran. “Disarankan untuk memberitahu Polri sehingga Polri yang akan melakukan tindakan hukum,” ujar Dicky.

Berdalih bebaskan Makassar dari paham Marxisme dan Lenisme, empat orang yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan

menggerebek gerai Gramedia Trans Mall, Sabtu (3/8) pukul 16.00 WITA.

Mereka mengumpulkan kurang lebih 20 buku yang berhubungan dengan paham komunis yang dilarang di Indonesia berdasarkan Tap MPRS No 25 tahun 1966 itu. Buku-buku itu kemudian diserahkan ke pihak Gramedia untuk dikembalikan ke penerbitnya. Selanjutnya mereka memviralkan lewat media sosial kegiatan yang disebutnya sweeping.

Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulsel, Muhammad Zulkifli yang dikonfirmasi, Minggu (4/8) mengatakan, mereka melakukan aksinya setelah berkoordinasi dengan Pihak Polda Sulsel melalui direktorat intelkam dan pihak Kodam XIV/Hasanuddin. Namun karena digelar tiba-tiba, tak satu anggota dari dua institusi yang bergabung saat datangi gerai Gramedia itu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kodam dan AKBP Parenrengi dari direktorat Intelkam Polda tapi karena tiba-tiba, tidak ada yang bergabung,” ujar Muhammad Zulkifli. [ray/merdeka]

Sumber Asli :
<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-minta-keterangan-ahli-terkait-buku-karl-marx-lenin-di-gramedia-makassar.html>

Musda IV KNPI Bombana, Panitia Buka Pendaftaran Balon Ketua

Rumbia, SultraNET. | Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi

Tenggara (Sultra), Panitia pelaksana membuka pendaftaran bagi pemuda yang siap menjadi Ketua KNPI di Daerah penghasil emas tersebut.

Ketua Panitia Musda ke-IV KNPI Bombana, Andi Hasman menjelaskan jadwal pelaksanaan Musda jatuh pada Rabu 7 Agustus 2019.

“Pembukaan pendaftaran tersebut dimulai pada Senin hingga Selasa tepatnya tanggal 5-6 Agustus 2019 dan berakhir tepat pukul 0.0 Wita,” Katanya.

Adapun persyaratan pendaftaran menjadi calon ketua KNPI adalah sebagai berikut pertama tidak menjabat melebihi dua periode, kedua berusia maksimal 40 tahun dibuktikan dengan fotocopy KTP.

Ketiga berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota serta memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.

Hal ini dibuktikan dengan menyetorkan fakta integritas yang memuat pernyataan mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif.

Keempat Pernah atau sedang menjabat unsur pimpinan DPD KNPI Kabupaten atau unsur pimpinan OKP Nasional tingkat Kabupaten dibuktikan dengan menyetorkan copy SK kepengurusan dilembaga masing-masing.

Kelima Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis minimal tiga dari DPK KNPI Kecamatan dan minimal enam dari OKP nasional tingkat Kabupaten Bombana yang berhimpun dalam KNPI dan berstatus peserta Musda KNPI Kabupaten/Kota.

Keenam Menyampaikan daftar riwayat hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapan peserta musyawarah

Pendaftaran di Sekretariat KNPI Kabupaten Bombana.

“Persyaratan ini telah mengalami pembahasan berkali-kali dimulai dari tataran pengurus melalui Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) hingga difinalisasi oleh stering comitte.” Tutupnya (rls)

Tingkatkan SDM, Dinas Ketahanan Pangan Wakatobi Latih Kelompok Mandiri

Wakatobi, SultraNET. | Dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui dinas Ketahanan Pangan mengadakan pelatihan kelompok mandiri pangan kepada dua kelompok tani sebanyak 60 orang asal desa Desa Pada Raya dan Desa Komala, Kamis (01/08/2019).

Kegiatan tersebut mengangkat tema mewujudkan petani yang mandiri dan sejahtera, Kegiatan yang dihelat di aula dinas ketahanan pangan tersebut melatih peserta agar dapat mengerjakan administrasi keuangan kelompok, pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun, Analisa usaha tani serta pengembangan gizi keluarga.

Bukan hanya itu, setelah mendapatkan materi dari pembina, dua kelompok yang masing-masing menamakan dirinya kelompok tani Pamenturu dan Harapan lestari tersebut mempraktekan cara menanam dan memindahkan bibit tanaman sayuran seperti kangkung, terong, tomat dan beberapa jenis tumbuhan lainnya.



Selain diadakannya pelatihan, dinas ketahanan pangan memberikan bantuan dana kepada masing-masing kelompok sebagai modal usaha sebanyak 50 juta yang bersumber dari anggaran dana dekonsentrasi kemudian diperuntukkan untuk pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

Kepala Dinas ketahanan pangan kabupaten Wakatobi, Tamrin mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan tahapan kedua dari tiga tahapan kelompok mandiri pangan.

“Ada tiga tahapan dalam pembinaan kelompok mandiri pangan ini yang pertama adalah tahapan persiapan, tahapan pembinaan serta tahapan lanjutan,” ujarnya pasca pelatihan digelar.

Sehingga Tamrin berharap, kelompok ini menjadi kelompok yang mandiri secara individu dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Menurutnya, berbicara soal ketahanan pangan bukan hanya menjadi tugas pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab bersama dari masyarakat serta swasta.

“Pendidikan seperti ini merupakan pendidikan nonformal yang merupakan upaya-upaya pemerintah daerah agar sumberdaya manusia yang mumpuni dapat kita wujudkan,” pungkasnya.

Laporan : Samidin

Upaya Pemerksaan Di Kolut Gagal. Terungkap Korban Ternyata Lelaki

Lasusua, SultraNet. | Beruntung upaya Pemerksaan terhadap Lisa (15) yang masih berstatus pelajar warga Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara tidak berhasil dilakukan oleh terduga pelaku Agus, Warga Desa Rante Limbong, Kecamatan Kodeoha.

Dilansir dari laman fb Beritaku.com, Kejadian bermula Pada hari Kamis, (01/08/2019) sekitar pukul 20.00 Wita, korban dijemput oleh seorang lelaki bernama Cilonk menuju ke area by Pass Lasusua.

Selanjutnya sekitar pukul 20.45 Wita, ditempat tersebut korban kemudian dijemput oleh Agus menuju ke Desa Rante Limbong.

Pukul 21.00 Wita korban tiba dirumah Terduga Pelaku dan langsung masuk ke kamar dan Agus kemudian kembali keluar meninggalkan rumah.

Sekitar pukul 23.45 Wita Agus kembali kerumah dan langsung masuk kamar dan mencium korban (bekas cuppang pada leher).

Namun sekitar 03.00 Wita, (2/8/2019) korban melarikan diri karena pelaku mencoba membuka celana korban dan akan melakukan percobaan pemerksaan.

Pukul 03.30 Wita tepatnya dijembatan Desa Rante Limbong korban

ditemukan oleh Anggota Polres Kolut selanjutnya korban dibawa ke Kantor Polres untuk ditindak lanjuti.

Kejadian tersebut diduga terjadi akibat pengaruh media sosial dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, beruntung korban bisa melarikan diri sehingga tidak terjadi TP Pamerkosaan.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terungkap fakta yang mengejutkan dimana Korban (lisa) bukan melarikan diri akan tetapi korban di usir oleh Agus karena telah sadar bahwa korban Lisa berjenis kelamin Laki-laki. (int)

Wakatobi Jadi Top Destinasi Nasional, Investasi Masuk Capai Ratusan Milyar

Wakatobi, SultraNET. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi patut diacungi jempol. Pasalnya, sejak tahun 2018 dinas yang melayani berbagai macam perizinan ini berhasil melayani investor hingga nilai investasi capai ratusan milyar.

Investasi tersebut bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2018 mencatat ada 43 investor dengan nilai investasi Rp.284 milyar yang mana jumlah tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 100 milyar sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 184 milyar.

Meskipun telah berkontribusi menaikkan jumlah investor, kinerja dan langkah mendukung visi misi Kabupaten Wakatobi bukan hanya sampai

disitu.

Dinas yang sekarang dipimpin oleh Saoruddin,S.Pi M.Si tersebut pada tahun 2019 mampu melakukan pendataan terhadap investor menjadi 185 investor di seluruh wilayah kabupaten Wakatobi.

“hal ini disebabkan pada tahun 2018 pendataan belum terlalu intens. Pada tahun 2019 ini kami tidak hanya berharap terhadap laporan kegiatan namun secara langsung melakukan pendataan di lapangan, mendata perusahaan terutama data base perusahaan,ucap Saoruddin, Kamis (18/07/2019).

Tempat yang Layak Berinvestasi



Para Investor yang melakukan investasi di kabupaten Wakatobi tidak salah lagi menempatkan investasinya di daerah maritim ini.

Sebab pemerintah pusat telah menempatkan kabupaten wakatobi masuk dalam daftar 10 daerah top destinasi pariwisata nasional. Tentu dengan menjadi prioritas nasional daerah ini bakal mendapatkan perhatian yang serius, baik dari segi pembiayaan maupun perencanaannya.

Langkah yang telah diambil pemerintah pusat bukan tanpa alasan. Kabupaten yang terdiri dari empat gugusan pulau-pulau ini punya berjuta-juta kekayaan yang nantinya dapat menarik para wisatawan. Bayangkan saja daerah tenggara Sultra ini merupakan salah satu cagar biosfer dari 8 yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2012 United Nations Of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Wakatobi sebagai salah satu cagar biosfer bumi dari 621 cagar biosfer pada 117 Negara.

Belum lagi dilihat dari potensi wisata bawah laut yang begitu menjanjikan. Ada 123 spot diving dan dihiasi oleh 750 spesies karang, dan 942 jenis ikan. bahkan jumlah itu mengalahkan jumlah spesies karang yang berada di laut Karibia dan laut merah. Pantaslah kemudian Wakatobi disebut surga nyata bawah laut.

“Jika diibaratkan Wakatobi adalah Manusia maka Dia adalah perempuan cantik yang pantut disanjung karena pulau ini berada di pusat segitiga karang dunia dengan luas karang 118.000 hektar. Atol Kaledupa 48 kilometer yang merupakan Atol terpanjang di dunia,”ucap Arhawi belum lama ini.

Pelayanan Dinas PMPTSP Tingkatkan PAD



Proses Pelayanan Perizinan

Kabupaten Wakatobi patut berbangga, Meskipun sektor unggulan hanya melalui pariwisata, perikanan dan perdagangan antar pulau, ternyata hal

itu tidak menyurutkan niat besar kepala dinas PMPTSP untuk bekerja maksimal mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Wakatobi.

Niat utama dinas PMPTSP bukan hanya soal peningkatan PAD. Dinas teknis ini sangat mengutamakan pelayanan sehingga hal itu dituangkan dalam visinya “penanaman modal berdaya saing dan berkelanjutan”. Kemudian dinas yang dipimpin mantan Kepala Bappeda tersebut merancang misi meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan, meningkatkan potensi promosi dan kerjasama penanaman modal, meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan.

Pelayanan perizinan yang baik ternyata sanggup mendobrak peningkatan PAD. tercatat, pada tahun 2018 pemerintah kabupaten Wakatobi melalui dinas Pananaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dalam jenis izin IMB dengan target Rp 74.800.000 mampu direalisasikan hingga mencapai Rp 131.154.277 yang jika ditarik persentasenya capai 175%. Jenis izin itu belum termasuk SITU-MB, HO/SITU Perseorangan, HO/ SITU badan usaha, SIU Perikanan Perseorangan, serta SIU perikanan badan usaha. Jika dihitung secara keseluruhan, dari target RP 501.280.000, realisasi PAD tahun 2018 justru meningkat 146% yaitu capai Rp 734.299.247.

Kendati demikian, pada tahun 2019 ini pihak PMPTSP akan lebih giat lagi merealisasikan target yang bakal dicapai. Pasalnya, diungkapkan Saoruddin bahwa dari beberapa jumlah izin yang menjadi sumber realisasi PAD pada tahun ini tidak akan lagi dipungut biaya retribusinya.

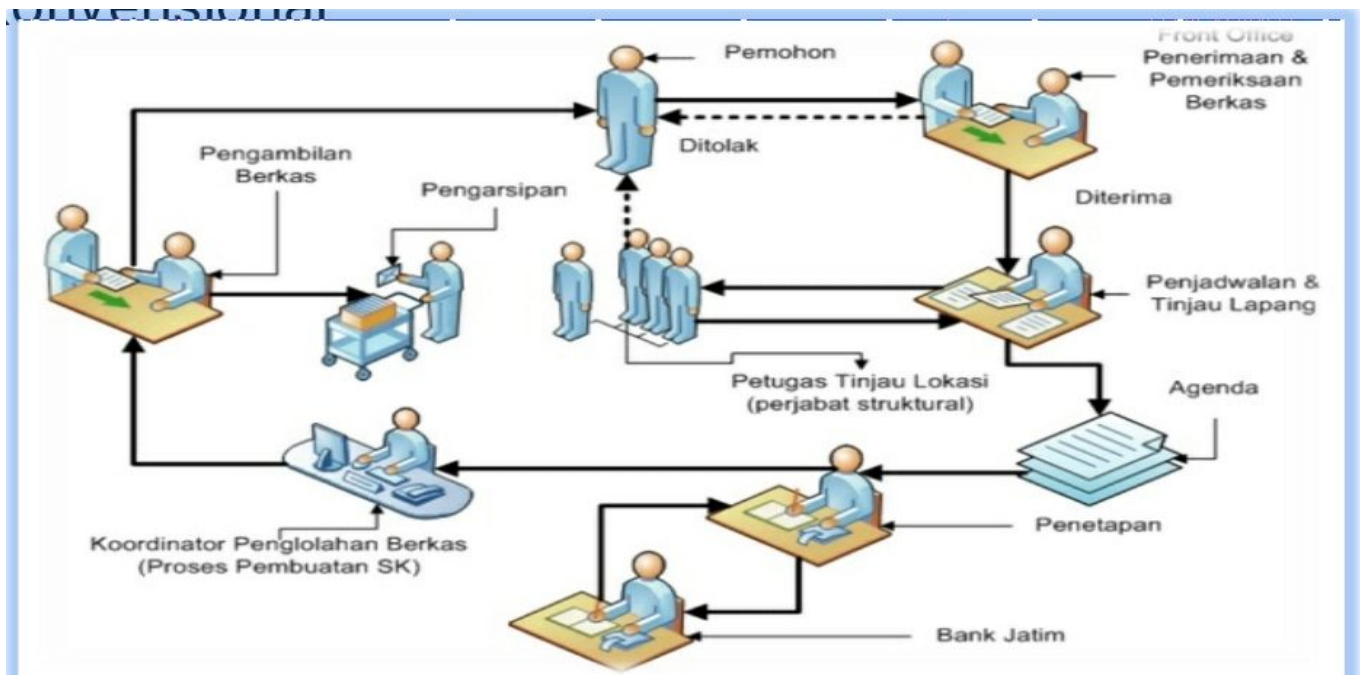
“Dengan berlakunya Permendagri nomor 19 tahun 2017 untuk segera mencabut perda mengenai izin gangguan maka sejak maret 2019 ini kami tidak lagi melakukan pemungutan retribusinya,”ungkapnya.

Makanya, jika dilihat dari tren perkembangan PAD melalui retribusi sejak tahun 2018 dibandingkan 2019 akan mengalami penurunan. Meski demikian, pihaknya akan terus bekerja memaksimalkan pelayanan agar PAD wakatobi melalui berbagai jenis Izin yang lain mampu menyamai PAD pada tahun-tahun sebelumnya.

Layani 76 Jenis Izin, PMPTSP Gunakan Sistem Online

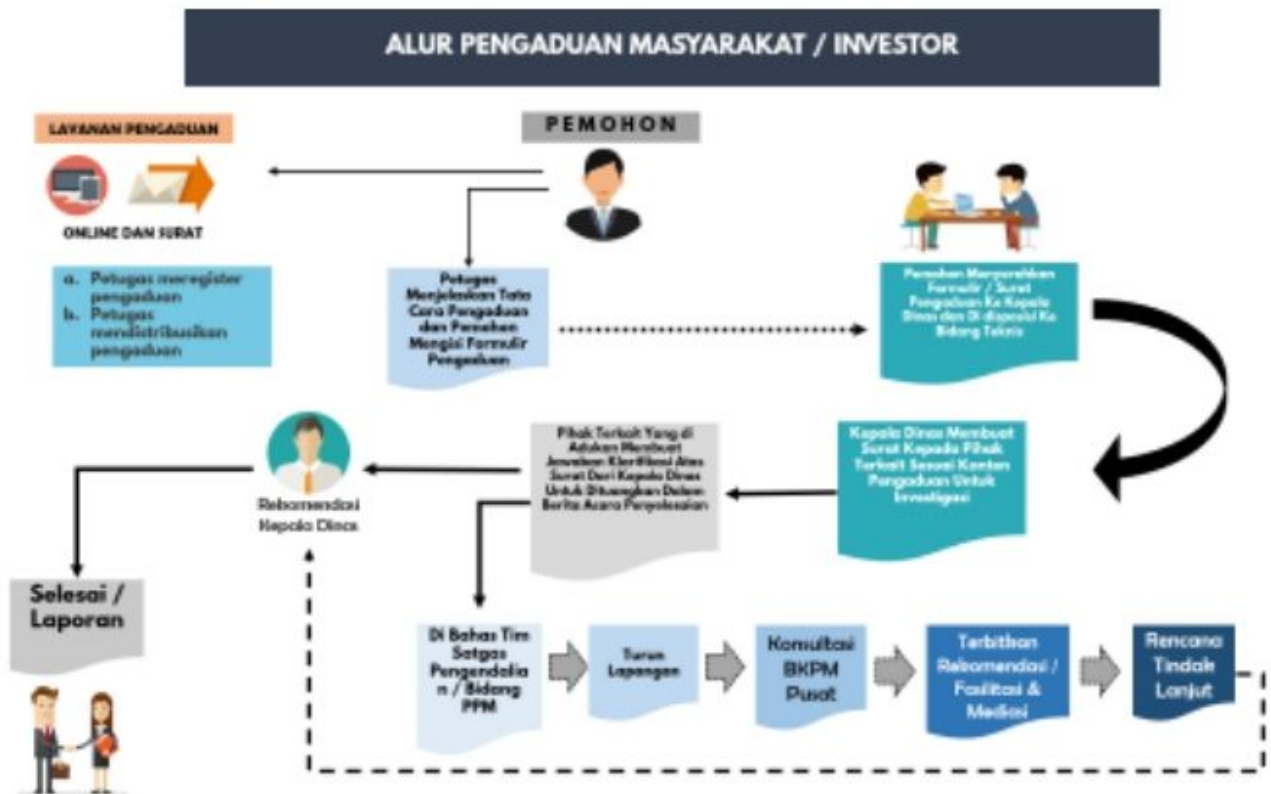
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kabupaten Wakatobi saat ini melayani 76 jenis izin. Agar proses pembuatan izin lebih efektif dan efisien PMPTSP memberi ruang yang mudah kepada para investor salah satunya dengan membuat situs resmi yang dapat dengan mudah diakses. Mekanisme pelayanan perizinan menggunakan system online yakni melalui Sistem Aplikasi Perizinan Terpadu (SAPIRU) Online dengan alamat <http://perizinan.wakatobikab.net> dan juga dapat melalui Online Single Submission (OSS) Yang dapat diakses melauai alamat <http://oss.go.id>.

Selain menggunakan pelayanan perizinan secara online PMPTSP juga dapat menerima proses perizinan secara konvensional. Mekanisme Pelayanan perizinan secara konvensional dapat dilihat melalui gambar berikut;



Sebagai bahan evaluasi dari dinas teknis ini, PMPTSP Menyediakan alur pengaduan masyarakat atau investor. Alur tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut ;

Pengendalian & Pengawasan



Dinas PMPTSP Terlibat Aktif Sosialisasikan Pelayanan Perizinan



Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah beberapakali menggelar sosialisasi pelayanan perijinan melalui berbagai item kegiatan.

Di Aula Pesanggarahan Wangi-wangi selatan pada Kamis (28/02/2019) lalu, dinas PMPTSP menggelar Sosialisasi dengan tema “memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum”.

Dalam Sosialisasi yang dihadiri puluhan Pengusaha, Investor, dan Forkopimda tersebut memaparkan berbagai langkah-langkah teknis dalam membuat berbagai jenis Surat ijin baik itu berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Hordo Ordonantie atau Surat Ijin Tempat Usaha (HO/SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUper), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Surat Ijin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar), Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (IUPAL), Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA), Serta Surat Ijin Praktek Dokter (SIPD).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Saoruddin berharap kepada semua Investor dan Pengusaha dapat dengan mudah membuat Ijin Sesuai dengan Jenis Usaha yang dimiliki.

“Sekarang untuk mengurus berbagai surat ijin sudah sangat dimudahkan karena dapat dilakukan secara elektronik dan secara konvensional,” jelasnya.

Bukan Hanya itu, pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Wakatobi, pekan lalu dalam rangka untuk mendorong terwujudnya industrialisasi perikanan yang unggul dan berdaya saing, Kepala dinas PMPTSP turut terlibat menjadi pemateri.

Dalam kegiatan tersebut kepala dinas jebolan Institut Pertanian Bogor tersebut membawakan materi mengenai kebijakan mekanisme pelayanan investasi di kabupaten wakatobi.

“Bukan hanya soal perizinan, namun kami selalu turut berpartisipasi mendorong industri perikanan dan berbagai investasi yang masuk di kabupaten wakatobi,” Ucap Saoruddin.

Pertemuan yang dilaksanakan di gedung villa Dasita, Wandoka kecamatan Wangi-wangi tersebut turut dihadiri para pelaku usaha hasil olahan ikan, dinas terkait, serta dihadiri pemateri dari konsultan FTA center makassar, Chairil Burhan dan Muhammad Sabranjamil Alhaqqi. (ADV)

Laporan ; Samidin

Diduga Peras Kepala Desa, Dua

Oknum LSM di Bengkulu Terjaring OTT Jaksa

SultraNET. | Diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah Kepala Desa, dua oknum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, Provinsi Bengkulu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (30/7/) sekitar pukul 11,00 WIB

Dikutip dari Teropongpublik.com, Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, H. Lalu Syaifudin membenarkan telah terjadi OTT terhadap oknum LSM tersebut di salah satu rumah makan di Pasar Kepahiang.

“Iya benar, tadi kurang lebih jam 11 yang dilakukan oleh tim gabungan atas perintah penyelidikan di Pidsus,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan via Whatshaap.

Penangkapan tersebut sambungannya berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada beberapa kades yang ditekan dan diintimidasi agar para kades menyerahkan sejumlah uang kepada oknum LSM tersebut terkait dana desa.

“Ikut diamankan uang senilai 30 juta, kemudian handphone dua dan 1 unit mobil hilux,” jelasnya

H. Lalu menjelaskan, kedua orang tersebut merupakan suami istri yang tergabung di LSM Badan Penelitian Aset Daerah berinisial R dan CS.

Kemudian, kata Haji Lalu dari Informasi sementara mereka meminta 50 juta kepada setiap kades. adapun kepala desa yang mendapat pemerasan yakni Kades Babatan, Bayung, Cerebon dan Benuang Galing.

“Tapi sekarang yang ada 30 juta, untuk sementara kedua oknum masih diperiksa terlebih dahulu selama 24 jam, hasil pemeriksaan nanti baru dianalisa dan masuk perbuatan tipikor atau umum. Kalau korupsi kita akan tetapkan sendiri sebagai tersangka, kalau ini umum kita akan serahkan kepihak kepolisian,” tutupnya (kutip/Teropongpublik.com)

Gantikan Hasrat, Suriadin Pimpin DPC PDIP Bombana

Rumbia, SultraNET. | Mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana, Suriadin ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu untuk menjadi Ketua DPC PDIP Bombana periode 2009-2024 menggantikan Hasrat yang sesuai hasil Konferensi Daerah (Konferda), Sabtu (27/7/2019) lalu terpilih sebagai Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara.

Ditemui disalah satu warkop di Ibu kota Bombana, Selasa (30/7/2019). Suriadin menuturkan ditunjuknya ia sebagai Ketua di Partai Berlambang Banteng itu, berdasarkan rekomendasi ke DPP PDIP melalui musyawarah bersama Konfercab penyempurnaan menggantikan Hasrat yang oleh Partai ditugaskan naik level sebagai Sekretaris DPD PDIP Sultra mendampingi Abu Hasan sebagai Ketua DPD terpilih.

“Dengan naiknya beliau (Hasrat.red) kelevel lebih tinggi sebagai Sekretaris DPD, tentu memberi kesempatan terhadap kader lain untuk berproses melanjutkan kepemimpinannya dan partai mempercayakan itu kesaya, sebagai kader tentu saya harus selalu siap,” Ucap pria yang akrab disapa Surya itu.

Untuk itu, berkaca pada kepemimpinan Hasrat sebelumnya yang dinilai berhasil karena mampu mencetak tiga anggota DPRD pada pemilu 2019 lalu, diamana satu diantaranya sebagai anggota DPRD Provinsi, maka sebagai Ketua terpilih diakui Surya bakal berusaha lebih baik lagi agar pencapaian partai dimasa mendatang dapat mengalami peningkatan.

“Segera setelah kegiatan Kongres V di Bali dalam waktu dekat ini, kami segera melakukan kunjungan sekaligus konsolidasi ke seluruh PAC Kecamatan secara bergilir di Seluruh wilayah Bombana ini agar

kosolidan partai semakin baik lagi,” Bebernya

Ditambahkannya bahwa keberhasilan partai PDIP menambah perolehan kursi DPRD di Kabupaten Bombana dan satu kursi untuk DPRD Provinsi tidak lepas dari kerja sama DPC dan seluruh PAC yang ada di wilayah itu.

“Jadi partai ini solid karena semua pengurus PAC di 22 Kecamatan bekerja untuk membesarkan Partai pada Pemilu yang lalu, saya berharap dan berupaya agar kedepannya bisa lebih solid lagi apalagi dalam menghadapi Pilkada atau Pemilu mendatang.” Pungkasnya

Pada Konfercab Penyempurnaan tersebut dipilih sebagai Sekretaris DPC PDIP Bombana Herlin dan sebagai Bendahara yaitu Yuslia, keduanya adalah Anggota DPRD Kabupaten Bombana terpilih untuk periode 2019-2024. (IS)

Pemerintah Wacanakan Pemindahan Ibu Kota, Harga Tanah di Kalteng Naik 4 Kali Lipat

Jakarta, SultraNET. | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui lokasi pemindahan ibu kota adalah Kalimantan. Meski demikian, dia belum menyampaikan di provinsi mana lokasi pemindahan Ibu Kota Negara nanti.

Dengan munculnya isu ini, harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya.

“Masyarakat sekarang banyak berbondong-bondong ada yang menjual

tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat,” kata Binartha salah satu masyarakat saat ditemui Kantor Berita Antara di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dikutip Antara, Selasa (30/7).

Binartha menjelaskan, bahwa kenaikan harga tanah di dekat lokasi pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota. Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20×30 meter, dengan harga Rp10 juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.

Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp 40 juta per kavling dan Rp 100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat. Menurutnya, hal tersebut adalah langkah yang kurang tepat, sebab belum dipastikan secara tepat mengenai lokasi Istana Negara ataupun pusat ibu kota nantinya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Manuhing Sugiarto juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu ambil langkah spekulatif dengan aksi jual beli tanah. Dia mengimbau masyarakat tidak terbawa isu mengenai tingginya harga tanah yang akan diganti nantinya, menyusul pembangunan Istana Negara yang akan dicanangkan.

“Lokasinya saja belum dipastikan titiknya, kok sudah pada jual beli, nanti kalau salah kan rugi besar, tidak usah beli-beli tanah dulu,” kata Sugiarto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Presiden Joko Widodo usai mengunjungi Kecamatan Manuhing, Gunung Mas, pada Mei 2019, mulai menaruh hati dengan lokasi tersebut. Namun saat ini kajian masih dilakukan.

Data menunjukkan, prediksi kebutuhan lahan untuk Istana Negara akan memakan luas sekitar 121 hektare, jika administrasi tanah milik warga tidak diperoleh dengan cara yang benar, ditakutkan lahan yang terkena dampak pembangunan tidak akan mendapat ganti rugi.
[azz/merdeka.com]

Telah Terbit di _____ :
<https://www.merdeka.com/uang/ramai-isu-pemindahan-ibu-kota-harga-tanah-di-ka-lteng-naik-4-kali-lipat.html>

Lagi, Baruga Moico Rusak Parah Dihantam Angin

Rumbia, SultraNET. | Salah satu rumah bantuan Pemerintah Kabupaten Bombana “Baruga Moico” milik warga dusun Patengge, Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) rusak parah akibat diterjang angin, pada Senin (30/7/19) sekitar pukul 10.00 Wita.

Saat dikonfirmasi, Ernawati, pemilik rumah membenarkan peristiwa tersebut, namun saat angin kencang terjadi hingga merubuhkan atap rumahnya itu, ia sedang tidak berada dirumah.

“Benar itu rumah milik saya, pada saat kejadian itu, saya berada di poleang bukan dikabaena. Tapi kata tetangga saya kejadiannya kemarin sekitar pukul 10.00,” ungkap Ernawati sebagaimana dilansir Kabaenapos.

Ia menambahkan, dari penuturan para tetangga, akibat dahsyatnya angin membuat rangka atap rumah yang berbahan baja ringan dan beratap seng miliknya roboh dan rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut,

“Terpaksa saya perbaiki dulu biar bisa ditempati lagi,” tutupnya.

Kerusakan rumah bantuan pemda akibat angin kencang bukan cuma kali ini terjadi, sekitar tanggal 4 Januari 2019 lalu, hal yang sama terjadi di Baliara selatan Kecamatan Kabaena Barat, dilaporkan rumah tersebut rata dengan tanah akibat terjangan angin kencang.

Diketahui, “Baruga Moico” adalah program bantuan pemerintah Bombana yang diperuntukan bagi keluarga miskin. Baruga Moico dibangun dengan anggaran RP. 31 juta per unitnya. Dana tersebut sudah termasuk potongan pajak, tukang dan bahan bangunannya menggunakan baja ringan, batako ringan dan seng termasuk lantai yang diplur. (As/KP)